

SISTEM PENYIARAN DI ACEH DARI ERA KOLONIAL BELANDA HINGGA ORDE BARU: SATU PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh: **Hamdani M. Syam**¹

ABSTRAK

Tulisan ini menelusuri mengenai sistem penyiaran di Aceh dari era kolonial Belanda hingga Orde Baru. Untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan perspektif sejarah melalui 4 langkah analisis yaitu heuristik, verifikasi interpretasi dan historiografi. Hasil analisis mendapati bahwa sejarah pembangunan sistem penyiaran di Aceh dari era kolonial Belanda hingga era Orde Baru memperlihatkan bahwa telah berlaku beberapa perubahan sistem penyiaran pada masing-masing era tersebut. Perubahan itu dilandasi untuk kepentingan masing-masing penguasa yang berkuasa pada masing-masing era itu. Dari hasil analisis juga mendapati bahwa faktor politik merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi sistem penyiaran di Aceh pada masa itu. Walaupun faktor sosial budaya juga memberikan pengaruh, tetapi tidak mendapatkan hasil yang begitu kuat.

ABSTRACT

This paper trace of the broadcasting system in Aceh from the Dutch colonial era to the New Order. To get an answer to a question that will be discussed in this paper, the authors use a historical perspective through four steps, namely heuristic analysis, interpretation and verification of historiography. Results of the analysis found that the history of the development of the broadcasting system in Aceh from the Dutch colonial era to the era of the New Order show that has been in effect some changes in the broadcasting system of each era. The change was based on the respective interests of the ruling authorities in each of the era. From the analysis also found that the political factor is the most dominant factor in influencing the broadcasting system in Aceh at the time. Although the socio-cultural factors also influence, but did not get the results that are so strong.

Kata Kunci: Sejarah Penyiaran, Kolonial Belanda, Orde Baru, Aceh.

Keywords: History of Broadcasting, Dutch Colonial, New Order, Aceh.

1 Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala. (hamdanim.syam@yahoo.com)

PENDAHULUAN

Banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Aceh. Salah satunya peristiwa sejarah yang sangat jarang diberikan fokus pembahasan dalam dunia akademik adalah mengenai peristiwa sejarah dunia penyiaran yang pernah terjadi di daerah ini. Apabila melihat kembali kepada sejarah penyiaran yang pernah terjadi di negara Indonesia, Aceh merupakan daerah yang pertama memperkenalkan dunia penyiaran yaitu melalui radio telegraf pada tahun 1911 di Sabang, jauh ketika Belanda memperkenalkan penyiaran radio di Malabar, Bandung pada 1923 dan Bataviase Radio Vereniging (BRV) pada tahun 1925 di Batavia.

Penyiaran merupakan salah satu media yang efektif bagi masyarakat karena jangkauannya yang luas dan dapat menembus berbagai lapisan masyarakat. Mengkaji terhadap penyiaran adalah sesuatu yang menarik untuk dilakukan pengkajian karena keunikan media ini. Di samping bisa digunakan sebagai media hiburan tetapi juga dapat digunakan sebagai media politik dan pembangunan dalam sesuatu negara.

Setiap negara memiliki sistem penyiaran sendiri-sendiri. Bentuk dan perkembangan sistem penyiaran mempunyai perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Sistem itu sehaluan dengan sistem politik dan sosial budaya yang berlaku di negara tersebut. Beberapa ilmuwan komunikasi seperti Schramm (1964); Lerner (1958) dan McDaniel (1994) telah membuat penelitian yang meneliti mengenai sistem penyiaran yang berlaku dalam sesuatu negara dan hubungannya pembangunan dalam negara tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media penyiaran bukan variabel bebas yang boleh berdiri sendiri dalam mencetus pembangunan tetapi ia perlu dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti sistem politik dan budaya. Maka itu, pembentukan sistem penyiaran dalam mencapai pembangunan sesuatu negara berhubungan kuat dengan sistem sosial dan politik yang ada dalam negara itu. Apabila keadaan sistem politik dan sistem sosial seperti ini, maka seperti ini pula sistem penyiaran yang berlaku di daerah ataupun negara itu.

Menurut McDaniel (1994); Asiah Sarji (1995); Johari Achee (2000); Rugh (2004); dan Masduki (2007), setiap negara di dunia, hubungan segi tiga antara sistem media, penguasa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Sistem penyiaran adalah sub-sistem dalam sistem media. Sistem media adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas seperti sistem politik dan sosial budaya. Menurut para peneliti tersebut, perubahan yang berlaku pada alam sekitaran media seperti teknologi, politik, ekonomi dan sosial budaya mampu mengubah bentuk dan perkembangan sistem penyiaran pada daerah ataupun negara yang dimaksud.

Tulisan ini, membahas mengenai sistem penyiaran di Aceh. Fokus pembahasan ini adalah mengenai sistem penyiaran di Aceh pada era kolonial Belanda hingga era Orde Baru. Apakah bentuk sistem penyiaran di Aceh dalam era tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam sekitaran media yang berlaku di daerah ini pada ketika itu? Pembahasan terhadap persoalan ini penting untuk diberikan perhatian, bagi melihat faktor sejarah mengenai sistem penyiaran yang terjadi di Aceh dalam era tersebut yaitu era kolonial Belanda, era kependudukan Jepang, era Orde Lama dan era Orde Baru. Tulisan ini, tidak melihat Aceh sebagai daerah tersendiri tetapi dilihat sebagai sebuah daerah yang mempunyai hubungan dalam sistem politik yang berlaku di negara Indonesia terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru. Maka tulisan ini, melihat sejarah sistem penyiaran di Aceh dalam empat sistem politik yang telah wujud di negara ini yaitu era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, era pemerintahan Orde Lama dan era pemerintahan Orde Baru.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Penyiaran

Penyiaran dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *broadcasting* yang mempunyai arti sebagai siaran radio dan televisi. Kedua alat ini dapat dikatakan juga sebagai media penyiaran. Menurut Asiah Sarji, sistem penyiaran adalah satu konsep besar yang tergabung dalam dua konsep utama, yaitu sistem dan penyiaran. Penyiaran adalah konsep yang diwakili oleh sebarang aktivitas penyampaian bahan siaran yang boleh dilakukan secara serentak baik menggunakan gelombang elektromagnetik, satelit, maupun sistem talian dalam bentuk audio, visual, atau kedua-duanya sekali. Sementara sistem adalah satu fungsi yang wujud dalam sebuah struktur sosial untuk menjalankan proses yang berlaku dalam penyiaran.

Membicarakan mengenai sistem penyiaran tidak boleh lepas dari bentuk-bentuk sistem yang lebih besar. Sistem penyiaran merupakan bagian atau sub-sistem dari sistem media massa. Sistem media massa bagian sub-sistem dari sistem komunikasi. Sedangkan komunikasi itu sendiri merupakan sub-sistem dari sistem sosial. Oleh karena itu, untuk mengetahui sistem penyiaran di sesuatu negara, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk sistem sosial dan pemerintahan tempat sistem penyiaran itu berada dan berfungsi. McQuail dan Masduki melihat sistem penyiaran tidak terlepas dengan undang-undang yang berlaku. Bentuk dan perjalanan sistem penyiaran sangat bergantung kepada undang-undang yang mengaturnya. Sementara Head menegaskan konsep sistem penyiaran adalah sebagai suatu susunan peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh sesuatu negara untuk digunakan pada organisasi penyiaran.

Konsep sistem penyiaran yang diberikan pengertian oleh Head telah didapati mempunyai maksud yang agak sempit. Kemudian apabila diteliti pengertian sistem penyiaran yang diberikan oleh Howell didapati mempunyai maksud yang lebih luas. Menurut Howell sistem penyiaran adalah unsur yang saling berkaitan dan bergantung di dalam satu-satu organisasi penyiaran atau di dalam satu sistem penyiaran yang lebih besar. Walaupun dari segi pengertian konsep sistem penyiaran menurut Head agak sempit, tapi dari segi pembahasannya telah didapati sama dengan Howell. Keduanya telah mengklasifikasikan sistem penyiaran seperti pemilikan, manajemen, pembiayaan, dan program siaran.

Menurut McQuail, institusi penyiaran adalah satu sistem yang dihasilkan dan dibentuk oleh masyarakat yang saling berhubungan dan bergantung. Dengan demikian, sistem penyiaran adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan di negara di mana ia beroperasi. Maka itu, sistem penyiaran bersifat dinamis. Dalam konteks ini penyiaran tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di pihak lain penyiaran juga dapat mempengaruhi lingkungan. Justru dengan sifat dinamis ini penyiaran cenderung untuk mempunyai kualitas penyesuaian yang berarti, ia akan menyesuaikan diri kepada perubahan dalam lingkungan demi kelangsungan hidupnya.

Keadaan Sistem Politik

Secara sederhana terdapat dua sistem politik yang mempengaruhi sistem penyiaran, yaitu otoritarian dan demokrasi. Kedua sistem politik ini bertentangan antara satu sama lain. Sistem otoritarian adalah berkeinginan untuk mengatur masyarakat untuk tetap berada dalam negara ataupun kaum elit tertentu. Sistem otoritarian beranggapan bahwa masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sehingga peranan penguasa lebih dominan. Dalam sistem komunikasi yang menganut sistem politik otoritarian ini, pengawasan terhadap media dilakukan oleh penguasa. Media berfungsi sebagai pendidik dan pemberi informasi yang telah ditentukan oleh penguasa.

Sementara sistem politik demokrasi adalah sebuah sistem politik di mana kesempatan untuk turut serta dalam pembuatan keputusan banyak diberikan kepada rakyat. Sistem politik demokrasi adalah sebuah sistem yang menempatkan kedaulatan rakyat pada pusat sistem

tertinggi. Rakyat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Dalam bidang komunikasi, menempatkan media penyiaran berpihak kepada kepentingan rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengatur bidang penyiaran. Pengertian sistem politik yang lebih dari satu dapat dipahami bahwa karena istilah politik memang mempunyai arti yang banyak. Sebab politik itu meliputi bermacam-macam kegiatan dalam sesebuah negara, ia berhubungan dengan proses penentuan tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Sistem politik meliputi juga negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dasar, dan pembagian kekuasaan. Ideologi sesuatu negara adalah sesuatu falsafah dalam sistem politik. Ideologi adalah sebagai suatu pandangan hidup atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya mengatur tingkah laku dalam berbagai segi kehidupan di dunia. Dalam sesuatu ideologi tertentu adanya sub-ideologi yang bersumber dari kelompok-kelompok kepentingan yang dilahirkan oleh adanya perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi, agama, etnis dan suku. Dengan demikian ideologi tampak sebagai suatu penjelmaan hasil konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan yang berkepentingan. Dalam proses mencapai konsensus itulah terjadi pertarungan antara sub-sub ideologi. Hal ini dapat dikatakan bahwa ideologi menyangkut masalah nilai atau pandangan hidup. Ideologi selalu menjadi asas keutamaan dalam sistem sosial dalam sesuatu negara.

Keadaan Sistem Sosial Budaya

Konsep sosial budaya merangkumi dua konsep yang maknanya amat berkaitan, yaitu sosial dan budaya. Konsep sosial adalah merujuk kepada masyarakat, berhubungan dengan konsep budaya. Sebab berbicara tentang masyarakat, tidak akan lepas berbicara tentang sifat-sifat asas manusia, seperti bagaimana manusia akan hidup, dan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Berbicara mengenai konsep sosial adalah sama dengan membicarakan konsep masyarakat. Sebab ia akan berhubungan dengan kumpulan terbesar seperti individu-individu, penduduk dan organisasi. Masyarakat mengandungi masa, tempat dan minat. Masyarakat mempunyai kepercayaan dan tujuan hidup. Masyarakat mempunyai sistem moral dan peraturan yang menghubungkan dan meningkatkan hubungan antara satu sama lain.

Sementara pengertian konsep budaya menurut Kamus Dewan, apabila didefinisikan secara hurufiah adalah sebagai peradaban, kemajuan pikiran, akal budi yang meliputi cara berpikir, berkelakuan dan cara manusia berhubungan dengan manusia lain. Definisi ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat yang menyatakan budaya itu dari perkataan Sangskrit *Buddhi* yang berarti budi atau akal. Pengertian seperti ini menggambarkan bahwa budaya adalah prilaku yang dihasilkan oleh manusia secara sistematis melalui proses pemikiran dan pembelajaran dari alam sekitarnya. Menurut Milner dan Browitt, budaya sebagai satu keseluruhan sistem yang kompleks mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesuisilaan, undang-undang, adat resam dan kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Konsep sosial adalah berhubungan dengan individu, kumpulan, institusi dan sistem yang menghubungkan manusia berasaskan satu-satu kepercayaan, norma, nilai, peraturan dan undang-undang. Sementara konsep budaya adalah satu cara hidup yang merujuk kepada peradaban sesuatu masyarakat baik diwarisi atau penyesuaian dengan alam sekitar masyarakat berkenaan hasil dari kemajuan berpikir meliputi aspek ilmu pengetahuan, ekonomi, sistem simbol seperti bahasa, kepercayaan, nilai dan norma, kesenian, kesuisilaan, adat resam, undang-undang dan teknologi yang menjadi milik bersama masyarakat.

METODOLOGI

Di dalam melakukan penelitian ini, maka perlu menggunakan metode sejarah. Menurut Berger dan Asiah Sarji (1996), metode sejarah adalah metode yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Metode sejarah sebagai metode yang mengkaji peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam jangka waktu yang sudah lama dan penting. Adapun metode sejarah dalam mendapatkan data penelitian ini terbagi pada empat langkah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang penulis kerjakan adalah heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber atau data yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen, koran, artikel yang dianggap mempunyai kaitan dan dapat membantu penulis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Langkah kedua yaitu verifikasi sumber. Setelah sumber sejarah yang dibutuhkan terkumpul maka dilanjutkan dengan tahapan menverifikasi sumber tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keabsahan atau keaslian sumber yang didapatkan baik secara intern dan ekstern. Secara intern adalah menelaah dan memverifikasi kebenaran isi atau fakta sumber baik melalui buku, artikel, laporan, maupun arsip. Secara ekstern, yaitu dilakukan dengan cara memverifikasi untuk menentukan keaslian sumber. Hal ini dilaksanakan agar penulis dapat menghasilkan suatu tulisan yang benar-benar objektif yang berasal dari data yang terjaga keasliannya dan keobjektifannya tanpa ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi hasil penulisan.

Langkah ketiga yaitu interpretasi. Metode ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian ini dengan cara memaparkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Langkah selanjutnya adalah historiografi, yaitu tahap akhir dari penulisan, atau dapat juga dikatakan dengan penulisan akhir dari suatu penulisan yang diperoleh dari fakta-fakta, dilakukan secara sistematis dan kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penyiaran di Era Kolonial Belanda

Di era kolonial Belanda, Aceh merupakan sebuah daerah pertama yang diperkenalkan penyiaran radio oleh negara penjajah Belanda yaitu pada 1911 di Pulau Weh, Sabang. Pada awal berdirinya radio di daerah ini lebih dikenal sebagai radio telegrafi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sen dan Hill (2001:94) mendapati bahwa Sabang adalah pintu masuk ke Selat Malaka yang terletak di penghujung Pulau Sumatera. Menurut Muhammad Subhan (2008), kawasan Selat Malaka merupakan jalur kapal laut paling sibuk antara abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sejak Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas pada 1896 oleh pemerintah Hindia Belanda, Teluk Sabang telah banyak berlayar kapal-kapal besar dari benua Eropa, Afrika dan Asia. Pada mulanya pelabuhan bebas ini hanya berfungsi untuk melayani keperluan bahan bakar batu bara dan air minum bagi kapal-kapal laut yang singgah, namun akhirnya berkembang menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai. Menurut data dari Departemen Penerangan, Sabang merupakan pintu masuk ke perairan Hindia Belanda bagi kapal laut yang datang dari Eropa baik dari jalur timur yaitu masuk ke Selat Malaka menuju Medan, Penang dan Singapura maupun jalur barat yaitu masuk melalui Laut Hindia dan menyusuri pantai barat Pulau Sumatera menuju pelabuhan-pelabuhan Padang, Bengkulu sampai Batavia (Jakarta sekarang) terus ke arah kawasan-kawasan timur nusantara.

Radio digunakan pada masa itu sebagai alat komunikasi untuk mengatur dan sebagai alat untuk mengadakan hubungan dengan kapal laut yang melintas di Selat Malaka (Sen

dan Hill) . Di samping itu juga radio digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana penyampai informasi dan alat komunikasi antara negara yang sedang dijajah dengan negara asalnya di benua Eropa. Pada tahun 1914 hingga 1918 dunia sedang berlaku Perang Dunia I. Pada masa ini banyak kawasan di dunia termasuk kawasan Sabang tidak dibenarkan untuk mendengar siaran radio. Siapa yang mendengar radio dianggap illegal sebab akan mengganggu aplikasi pasukan tentera yang sedang digunakan untuk berperang.

Sistem Penyiaran di Era Pendudukan Jepang

Dengan berubah kekuatan penjajah di kawasan timur sejak tahun 1942, Aceh berada di bawah pendudukan Jepang termasuk Sabang. Pada masa ini status Sabang sebagai pelabuhan bebas dicabut, kemudian Sabang itu dijadikan sebagai pangkalan Tentera Laut Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, di daerah Aceh telah dibangun sebuah studio dan pemancar radio yang berkekuatan kecil yaitu Kutaraja Hosokyo di bawah pembinaan bagian penerangan Jepang yaitu Hodoka. Pemerintah Jepang mewajibkan Radio Kutaraja Hosokyo untuk menyiarkan siaran berita dari Radio Hosokyo di Bukit Tinggi. Pada masa ini Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahan tentera Jepang untuk kawasan pulau Sumatera.

Sistem Penyiaran di Era Pemerintahan Orde Lama

Di era pemerintahan Orde Lama, pada awal kemerdekaan Indonesia siaran radio di Aceh telah memberikan peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah tentera Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui oleh masyarakat Aceh pada 21 Agustus 1945 melalui informasi yang disampaikan oleh Ghazali Yunus beserta dengan kawan-kawannya yang bekerja di Kantor Berita Jepun yang bernama Domei Kutaraja dan Koran Atjeh Sinbun. Mereka mengetahui informasi kemerdekaan itu dari siaran berita radio Kutaraja Hosokyo yang ada dalam kantor tersebut.

Menurut Ali Hasjmy, setelah masyarakat Aceh mengetahui kekalahan Jepang terhadap Sekutu, mereka yang bergabung dengan Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), kemudian IPI bertukar nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI), merebut Kantor Hodoka. Kantor ini pada 1 Februari 1946 telah dijadikan sebagai Balai Penerangan Umum. Kemudian bertukar menjadi Kantor Penerangan Keresidenan Aceh. Walaupun pada awalnya kantor ini tidak berfungsi dengan baik sebagai pusat informasi, sebab sikap tentera Jepang yang masih berkuasa. Baru pada 25 Agustus 1945, setelah pimpinan Keresidenan Aceh, Syu Chokang mengumumkan secara resmi berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Maka sejak masa itu semua kantor pemerintahan Jepang di Aceh sudah tidak berfungsi lagi.

Berdirinya Kantor Penerangan di Aceh sangat penting sebagai pusat informasi untuk menyampaikan berita-berita demi kepentingan perjuangan dalam mengimbangi propaganda Belanda yang sudah ingin lagi menguasai semua daerah jajahannya sesudah Jepang keluar dari daerah berkenaan. Kantor ini di samping bertugas menangkal propaganda Belanda dan melakukan penerangan kepada masyarakat, juga melakukan pengurusan siaran RRI Kutaraja yang telah mulai siaran pertama pada 11 Mei 1946 melalui gelombang 78 meter dengan kekuatan 25 watt dengan jarak jangkauan siaran hanya dalam wilayah Kutaraja.

Jarak jangkauan yang pendek itu tidak memuaskan bagi para pejuang karena tidak menjangkau daerah-daerah lain yang sedang melakukan perjuangan. Oleh itu timbul inisiatif dari angkasawan radio untuk memperbesar dan memperluas jarak jangkauan siaran radio berkenaan. Maka pada 15 Februari 1947, atas bantuan warga Indonesia keturunan Jerman, W. Schultz, yang bekerja pada Jabatan Pos, Telepon dan Telegraf berhasil memperluas jarak jangkauan RRI Kutaraja dengan pemancar baru yang berkekuatan 40 watt bekerja pada gelombang 66 meter.

Kemudian pada 9 April 1948, RRI Kutaraja telah memperluas lagi jangkauan

pemancar siaran hingga 325 watt melalui gelombang 33,5 meter. Kemudian menurut Ali Hasjmy, pada masa Kutaraja menjadi ibukota provinsi Sumatera Utara sejak 14 Desember 1948, jangkauan siaran RRI Kutaraja boleh sampai ketiga daerah yang masuk dalam wilayah provinsi ini yaitu Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Instansi pemerintah dan badan-badan perjuangan di tiga daerah berkenaan sangat merasa berkepentingan dengan perluasan jangkauan RRI Kutaraja, sebab akan memudahkan dalam melakukan hubungan pemerintahan dan perjuangan melawan Belanda yang mau lagi berkuasa.

Ketika Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, para pejuang kemerdekaan Indonesia sadar akan pentingnya peranan radio dalam perjuangan. Radio dapat dijadikan sebagai sarana penangkis propaganda musuh yang berusaha melemahkan semangat para pejuang. Maka pada 23 Juli 1947, Pasukan Tentera Divisi X telah berhasil membawa masuk sebuah pemancar radio dari Malaya. Pemancar tersebut dibawa masuk oleh John Lie, menembus pasukan Belanda yang sedang berada untuk mengawasi setiap kapal yang masuk melalui Selat Malaka. Radio ini kemudian diberi nama sebagai Radio Rimba Raya yang dimiliki oleh pasukan perjuangan kemerdekaan Divisi X dipimpin oleh Kolonel Husin Yusuf.

Pada mulanya pemancar radio itu dipasang di Krueng Simpo yaitu 20 km dari arah Bireuen menuju Takengon. Studionya terpisah jauh, dan berada di salah satu kamar rumah kediaman Komando Divisi X yaitu Kolonel Husin Yusuf, yang bertempat di Bireuen. Radio Rimba Raya ini selain dipergunakan sebagai pemancar siaran umum, kegiatan lainnya adalah untuk memonitor dan mengirim berbagai pengumuman kepada pasukan tentera yang tengah menjalankan tugas. Bireuen memiliki alam pengunungan dan berbukit, sehingga direncanakan Bireuen ini menjadi tempat pengungsian pemerintahan sipil dan pasukan tentera perjuangan apabila Kutaraja diduduki Belanda. Karena itulah, Komando Divisi X pernah ditempatkan di Bireuen termasuk pemasangan pemancar radio berkenaan. Setelah beberapa bulan dipasang di sini, kemudian dengan mempertimbangkan supaya dapat dimanfaatkan secara cepat untuk menyiarkan berita-berita perjuangan, maka pemancar tersebut dipindahkan ke Kutaraja. Pada ketika itu, Kutaraja sebagai pusat kegiatan lembaga pemerintahan. Radio Rimba Raya tidak sempat bersiaran disebabkan semasa proses persiapan studionya terjadi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Menurut Departemen Penerangan, pada tanggal tersebut pasukan tentera Belanda menyerang Yogyakarta sebagai ibukota negara Indonesia pada masa itu. Kemudian Belanda menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa orang penting lainnya. Kemudian pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Yogyakarta dipindahkan ke Sumatera, dan diberi nama sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Menurut Ali Hasjmy, setelah Yogyakarta diduduki Belanda, serangan tentera Belanda ke Aceh semakin bertambah. Akibat serangan tersebut, pada 20 Desember 1948, pemancar radio di Kutaraja yang dipasang di Cot Gue dipindahkan ke tempat lain yaitu daerah yang dituju pada awalnya adalah Burni Bius, tapi kemudian pemindahan ke daerah ini terpaksa dibatalkan sebab atas pertimbangan keselamatan dari serangan pesawat Belanda yang selalu terbang rendah mengejar radio ini. Maka pemindahan itu dialihkan ke Rimba Raya dekat Reronga, kira-kira 62 km dari arah Bireuen menuju Takengon. Maka sebab itu radio ini terkenal dengan sebutan Radio Rimba Raya. Menurut Muhammad T.W.H, ketika pemancar-pemancar RRI di berbagai daerah telah dikuasai oleh Belanda, Radio Rimba Raya tampil di udara mengisi kekosongan dengan hasil yang cukup baik menurut ukuran pada masa itu. Ketika Radio Batavia dan Radio Hilversum telah berhasil dikuasai oleh Belanda kemudian memberitakan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Alasan Belanda bahwa Yogyakarta sudah direbut oleh pihaknya, disusul pula dengan jatuhnya daerah-daerah lain kepada Belanda. Berita-berita bohong radio Belanda itu dibantahkan oleh

Radio Rimba Raya. Bahasa bantahan yang selalu digunakan adalah “Republik Indonesia masih ada karena pimpinan republik masih ada, tentera republik masih ada, pemerintah republik masih ada dan wilayah republik masih ada. Di sinilah Aceh salah satu wilayah republik yang masih utuh sepenuhnya”.

Menurut Arman Zamzami, Radio Rimba Raya selain bersiaran dalam Bahasa Indonesia juga bersiaran menggunakan bahasa asing seperti Inggris, India, Arab, Cina, Belanda dan Urdu. Menurut Ali Hasjmy, siaran pemancar Radio Rimba Raya dapat didengar dengan jelas di berbagai wilayah Semenanjung Malaya, Singapura, Saigon, Manila, New Delhi, Australia, dan beberapa tempat di Eropah.

Sistem Penyiaran di Era Pemerintahan Orde Baru

Di era pemerintahan Orde Baru, presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan autoritarian dalam mengurus negara Indonesia. Sifat autoritarian ini juga diterapkan kepada sistem penyiaran di negara ini. Dalam bidang radio, walaupun Soeharto telah membolehkan radio swasta untuk bersiaran tetapi dari segi rancangan dan perizinan tetap mendapat pengawalan dari pemerintah. Maka atas peraturan pemerintah yang begitu kuat itu sehingga membuat sistem penyiaran radio yang berlaku di Aceh tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem penyiaran yang berlaku di daerah-daerah lain yang masuk dalam lingkup wilayah negara Indonesia.

Perpanjangan izin siaran yang berlaku setiap tahun adalah suatu yang amat menyulitkan bagi stasiun radio yang berada di daerah terutama provinsi Aceh yang terletak paling ujung pulau Sumatera. Sebuah surat izin memerlukan masa berbulan-bulan untuk mendapatkan dari Jakarta dan biaya pengurusannya sangat mahal bagi sebuah stasiun radio swasta yang ada di daerah, apabila dibandingkan dengan pendapatannya sebulan. Banyak stasiun radio di daerah merasa keberatan dengan pembayaran ini. Kebanyakan dari mereka berusaha untuk menghindar dari peraturan pemerintah berkenaan. Departemen Telekomunikasi dalam pemeriksaan tahunan menutup radio-radio swasta yang tidak memiliki surat izin siaran. Di Aceh ada 36 stasiun dari 70 stasiun swasta yang ada ditutup pada tahun 1996 disebabkan tidak mempunyai izin siaran dari pemerintah.

Di era pemerintahan Orde Baru, Menteri Penerangan Harmoko pada 18 Februari 1993 meresmikan stasiun TVRI di Banda Aceh sebagai stasiun TVRI daerah yang ke-12 di negara Indonesia pada masa itu. Pembangunan stasiun penyiaran TVRI Banda Aceh merupakan bagian dari program Departemen Penerangan Republik Indonesia dalam membangun tiga stasiun penyiaran dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) ke-V yaitu Samarinda, Ambon dan Aceh. Stasiun penyiaran TVRI Banda Aceh merupakan peningkatan status TVRI Stesen Produksi Keliling (SPK) Banda Aceh yang sudah beroperasi sejak tahun 1982.

Menurut Yamin Hasan, ketika masih dalam status SPK, TVRI stasiun Banda Aceh merupakan unit kerja acara televisi di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi program dalam bidang hiburan, pendidikan dan penerangan untuk selanjutnya menjadi bahan siaran TVRI pusat di Jakarta. Dalam status SPK berkenaan, setiap hasil produksi yang telah diproses kemudian dikirimkan ke TVRI pusat untuk disiarkan secara nasional sesuai jadwal Pola Acara Terpadu yang telah ditentukan oleh Dit Bina Produksi dan Sub Dit Pemberitaan, Direktorat Televisi di Departemen Penerangan.

Dengan diresmikan TVRI stasiun Banda Aceh, maka seluruh perangkat dan infrastruktur TVRI SPK Banda Aceh seperti pegawai, peralatan pemancar dan semua peralatannya yang sebelum ini berdiri sendiri sebagai Sektor Transmisi Banda Aceh, menjadi satu unit kerja stasiun produksi TVRI Banda Aceh. Dalam status sebagai stasiun produksi penyiaran, maka TVRI stasiun Banda Aceh mempunyai tugas di samping merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi acara seperti yang dilakukan selama berstatus SPK

juga mempunyai tugas untuk menyiarkan semua hasil produksi sesuai dengan pola siaran program lokal, dan selanjutnya mempunyai tugas untuk mempersiapkan program-program bagi siaran TVRI nasional yang misi dan materinya telah ditentukan sebelumnya untuk disiarkan melalui TVRI pusat, sesuai dengan Pola Acara.

Kehadiran TVRI stasiun Banda Aceh dalam dunia penyiaran di Indonesia memiliki arti penting, sebab daerah jangkauan siaran berada di kawasan provinsi paling ujung barat negara Indonesia. Di mana daerah Aceh pada bagian selatan berbatasan dengan Australia, di bagian Barat berbatasan dengan India, di bagian Utara berbatasan dengan Asia Tenggara. Walaupun pada awal siarannya, TVRI Banda Aceh hanya mencapai daerah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang saja, namun apabila dilihat dalam aspek politik, pembangunan ini merupakan langkah yang bagus untuk pembinaan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Hal ini juga sesuai dengan falsafah TVRI pada masa itu yang selalu disiarkan melalui media ini pada masa itu. Falsafahnya adalah “Menjalin Persatuan dan Kesatuan”. Maka dengan falsafah ini dapat dilihat dari pola siaran yang diputarkan melalui TVRI yaitu melaksanakan program media komunikasi pembangunan dalam mempersatukan daerah-daerah yang begitu luas dalam sebuah sistem politik negara Indonesia. TVRI dituntut supaya mampu menterjemahkan semua dasar pembangunan di daerah maupun nasional ke dalam bentuk-bentuk siaran yang tepat dan menarik.

KESIMPULAN

Secara umum penelitian ini mendapati bahwa bentuk sistem penyiaran di Aceh dalam era kolonial Belanda hingga era Orde Baru mengikut sistem politik yang berlaku pada masa itu. Aceh merupakan daerah yang pertama dalam sejarah Indonesia yang memperkenalkan sistem penyiaran. Diperkenalkan oleh Belanda di Pulau Weh, Sabang pada tahun 1911. Sebelum pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945, Sabang merupakan jalur kapal laut dan pusat perdagangan yang cukup sibuk antara tahun 1896 hingga 1942. Belanda tidak mengenakan peraturan yang ketat ke atas sistem penyiaran media ini. Radio yang dibawakan Belanda selain digunakan sebagai alat hiburan dan digunakan juga sebagai alat komunikasi untuk mengatur dan untuk mengadakan hubungan dengan kapal laut yang melintas di Selat Melaka. Baru kemudian pada tahun 1913, Belanda membangunkan dan mengoperasikan stasiun-stasiun radio di beberapa tempat lain yaitu Batavia, Situbondo, Kupang, Ambon dan beberapa daerah lain meliputi hampir seluruh kawasan pulau Jawa. Kegunaan penyiaran radio sudah dipertingkatkan, di samping untuk hiburan juga digunakan sebagai sarana penyampai informasi dan komunikasi antara negara yang sedang dijajah dengan negara asalnya.

Ketika Jepang masuk, status Sabang sebagai pelabuhan perdagangan dibatalkan. Kemudian dijadikan sebagai pangkalan tentera lautnya. Semua stasiun dan organisasi radio diperintahkan untuk dibubarkan dan peralatannya harus diserahkan kepada tentera Jepang. Bagi mengurus penyiaran, Jepang membentuk organisasi Hoso Kanry Kyoku sebagai pusat radio di Jakarta. Sementara perkumpulan radio di daerah bernama Hoso Kyoku. Untuk daerah Aceh dibentuk Radio Kutaraja Hoso Kyoku berada di bawah pembinaan bagian penerangan Jepun, iaitu Hodoka. Jepun melakukan sistem pengawalan ketat terhadap sistem penyiaran. Radio diwajibkan menyiarkan propaganda Jepang yang bertujuan untuk mengambil hati masyarakat negara yang dijajah.

Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan, daerah Aceh menjadi bagian dari Indonesia. Maka sistem penyiaran di Aceh merupakan bagian dari sistem penyiaran yang berlaku dalam negara Indonesia. Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama mempergunakan penyiaran sebagai sarana untuk mempertahankan kemerdekaan dan alat pemersatu masyarakat. Kemudian apabila Soeharto berkuasa, sistem penyiaran diarahkan untuk mempertahankan

kekuasaannya. Pengawasan terhadap penyiaran begitu kuat. Soeharto melaksanakan sistem penyiaran yang terpusat. Segala sesuatu harus diatur oleh pemerintah pusat. Soeharto tidak memberikan kesempatan untuk daerah memiliki penyiaran sendiri. Daerah dijadikan sebagai pihak yang menerima apa saja siaran yang telah diputar melalui stasiun penyiaran di Jakarta, walaupun terkadang siaran itu tidak sesuai dengan konteks daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Armando. 2011. *Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.

Agus Sudibyo. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Jakarta: LKiS dan ISAI.

Al-Faqih, M., Z. 2006. PP Penyiaran dan Demokratisasi. <http://seputar-penyiaran.blogspot.com/2006/10/kpi-menegur-industri-berlalu.html> [29 Jun 2008].

Ali Hasjmy. 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh.

Asiah Sarji. 1996. Pengaruh persekitaran politik dan sosio-budaya terhadap pembangunan radio Malaya di antara tahun 1920-1959. Disertasi. Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

_____. 1995. Perkembangan penyiaran radio Malaysia berdasarkan maklumat yang disiarkan di akhbar-akhbar utama Malaysia dari tahun 1963-1967. Laporan Penyelidikan. Anjuran Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Berger, A., A. 2000. *Media and Communication Research Methods: an Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.

Dahl, R.A. 1978. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1995. *Radio, Televisi dan Film Dalam Era 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta.

Faisal Anwar, M. 2009. Amatir Radio Indonesia di Jaman Penjajahan dan Perang Kemerdekaan. <http://asiaaudiovisualrb09agisuseno.wordpress.com/amatir-radio-indonesia-di-jaman-penjajahan-dan-perang-kemerdekaan/> [7 November 2009].

Hachten, W., A. 1981. *The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies*. Ames: The Iowa State University Press.

Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Cipta Panca Serangkai.

Head, S., W. 1985. *World Broadcasting System: a Comparative Analysis*. California: Wadsworth Publishing Company.

Howell, W., J. 1986. *World Broadcasting in The Age of The Satellite: Comparative Systems, Policies and Issues in Mass Telecommunication*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Johari Achee. 2000. *Berita Televisyen dan Pembangunan Negara: Kajian Kes Radio*

- Televisyen Brunei. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
- Kamus Dewan. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1970. Kedapatan. www.ib.mylibmnet/budayalbudaya.htm [25 May 2008].
- Kompas. 1996. 12 November.
- Lent, J., A. 1978. *Broadcasting in Asia and Pacific: a Continental Survey of Radio and Television*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lerner, D. 1958. *The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East*. New York: The Free Press.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran: dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKis.
- McDaniel, D., O. 1994. *Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Company.
- McQuail, D. 1995. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*. London: Sage Publications.
- _____. 1987. *Mass communication Theory: an Introduction*. Eds ke2. London: Sage Publications.
- Milner, A. & Browitt, J. 2002. *Contemporary Cultural Theory*. Eds-3. London: Routledge.
- Muhammad T.W.H. 2000. *Peranan Radio di Masa Perang Kemerdekaan di Sumatera Utara*. Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI.
- Muhamad Mufid. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Subhan. 2008. *Pelabuhan Sabang: Peluang & Tantangan*. acehinstitute.com [23 Mei 2008].
- Rugh, W., A. 2004. *Newspapers, Radio, and Television in Arab Politics*. London: Praeger Publishers.
- Rusdi Sufi. 1999. *Perkembangan Media Komunikasi di Daerah: Radio Rimba Raya Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schramm, W. 1964. *Mass Media and National Development*. California: Stanford University Press.
- Sen, K., dan Hill, D., T. 2001. *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: ASAI dan PT Media Lintas Inti Nusantara.

Yamin Hasan. 1993. Sejarah perkembangan pertelevisian di Daerah Istimewa Aceh. Dlm. TVRI 31 Tahun: Prospek Perluasan Jangkauan Siaran TVRI Stasiun Banda Aceh, hlm. 7-15. Banda Aceh: TVRI Stasiun Banda Aceh.